
PENERAPAN WEBSITE *POLRESKENDAL.COM* DALAM TRANSPARANSI PENYIDIKAN SAT RESKRIM MELALUI SP2HP SECARA ONLINE DI POLRES KENDAL

Adhi Putranto Utomo *)

ABSTRAK

Di era pemerintahan yang demokratis sekarang ini banyak muncul berbagai koreksi dan komplain masyarakat terhadap institusi Polri yang kurang transparan dan kurang prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam proses penyidikan. Menanggapi koreksi dan komplain dari masyarakat tersebut Polri meluncurkan program *Quick Wins* sebagai program percepatan dalam meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi (Polri). Salah satu di antaranya yaitu program Transparansi Penyidikan melalui SP2HP yang bisa diterapkan dengan sistem website atau surat. Dimana masyarakat yang menjadi korban atau pelapor dapat mengetahui tentang perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri secara transparan dan cepat. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen dan teori komunikasi, digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem website dalam penyampaian SP2HP sudah baik? dan bagaimana kendala dalam penerapannya? Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kendal. Data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis deskriptif berdasarkan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan website dalam penyampaian SP2HP secara online di Polres Kendal belum maksimal dikarenakan mulai dari proses manajemen yang kurang matang sampai kegiatan pensosialisasian yang hampir tidak ada. Sehingga manfaat dari penerapan program tersebut tidak terasa bagi masyarakat Kendal maupun feedback dari masyarakat kepada pihak Polres Kendal sendiri. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan website *polreskendal.com* dalam transparansi penyidikan melalui SP2HP secara online di Polres Kendal masih kurang maksimal dan belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri. Perlu diadakan perbaikan terhadap sistem manajemen dalam penerapan website di Polres Kendal. Kegiatan sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang penyampaian SP2HP secara online melalui website *polreskendal.com*.

Kata Kunci: website *polreskendal.com*, transparansi penyidikan, SP2HP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak pencanangan Reformasi Menuju Polri Profesional pada Hari Bhayangkara Ke-53 pada 1 Juli 1999 silam, institusi Polri bertekad melakukan pembenahan mendasar menuju Polri yang profesional melalui aspek struktural, instrumental dan kultural.

Pemisahan Polri dari ABRI terjadi pada tahun 2000 ketika terbit Ketetapan MPR Nomor VI tentang pemisahan TNI dan Polri dan No VII tentang peran TNI dan peran Polri Tahun 2000. Dua tahun kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Setelah itu pada tahun 2005, keluar Surat Keputusan Kapolri ihwal Strategi Model Perpolisian Indonesia yang disebut polmas. Tahun 2006, muncul Komisi Kepolisian Nasional yang bertugas untuk mengawasi kinerja Polri, namun tahun berganti tahun harapan masyarakat akan sosok Polri yang ramah, melindungi, mengayomi, dan melayani belum juga terwujud.

Dalam kondisi masyarakat yang telah menikmati kebebasan di era pemerintahan yang demokratis, ditunjang oleh dunia teknologi informasi yang modern mempercepat tumbuhnya kesadaran hukum dari masyarakat, sehingga timbul sensitifisme terhadap berbagai hal dalam penegakan hukum dan pelayanan Polri pada masyarakat. Muncul berbagai koreksi dan komplain masyarakat terhadap institusi Polri yang kurang transparan dan kurang

prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat pada Polri, di antaranya:

- a. Masyarakat berharap bahwa keberadaan polri di tengah-tengah masyarakat benar-benar memberikan rasa aman.
- b. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang prima dari Polri, tidak dipersulit, cepat, dan tuntas dalam menyelesaikan masalah.
- c. Masyarakat mengharapkan adanya keterbukaan dan tanggung jawab dari setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Polri.
- d. Masyarakat juga mendambakan penampilan Polri yang profesional, bermoral, dan modern.

Sejumlah prestasi dan segenap harapan masyarakat serta catatan buruk yang telah melekat pada institusi Polri adalah pemicu bagi kepolisian untuk terus berinovasi, berkarya, dan meningkatkan kualitas layanan. Tugas utama yang harus dilakukan adalah menghapus catatan buruk yang telah melekat tersebut dengan memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, mencapai tujuan yang telah berhasil untuk mengembangkan prestasi itu tidak hanya meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, institusi Polri harus mampu menjawab sejumlah tantangan. Persepsi publik yang negatif terhadap

kinerja kepolisian harus dijawab dengan kinerja anti suap, sigap bertindak, dan profesionalisme kerja penyidikan yang transparan dalam menangani sebuah kasus kejahatan. Polisi profesional adalah polisi yang bekerja dengan keahlian dan tanggung jawabnya. Kerja penyidikan yang selama ini hanya mengandalkan sejumlah diskresi yang dimiliki kepolisian harus didukung dengan keahlian penyidikan, transparansi, penguasaan holistik atas berbagai produk hukum, dan kepekaan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menyikapi adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dan untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri, Presiden Republik Indonesia DR. Susilo Bambang Yudhoyono beserta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri telah meluncurkan program percepatan *Quick Wins* pada tanggal 30 Januari 2009 sebagai program unggulan dari hasil karya dan inovasi Polri yang sejalan dengan Grand Strategi Polri dalam tahap I (2005-2010) yaitu Membangun Kepercayaan (*Trust Building*). Tujuan dan sasaran dari program ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik (masyarakat) kepada institusi (Polri) dalam waktu cepat, merubah pola pikir, dan budaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik (masyarakat) kepada

institusi (Polri) dalam waktu cepat, merubah pola pikir dan budaya kerja serta manajemen Polri. Program ini terdiri atas:

- a. Quick Response Patroli Samapta.
- b. Transparansi Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB.
- c. Transparansi Penyidikan Melalui Pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangangan Hasil Penyidikan).
- d. Transparansi Rekrutmen Anggota Polri (AKPOL, PPSS, dan Bintara).

Empat program *Quick Wins* yang dipilih adalah bagian dari tugas pokok Polri dan merupakan produk unggulan yang memiliki daya ungkit yang kuat (*key leverage*) serta hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu singkat guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri, baik sebagai institusi maupun individu.

Menindaklanjuti program tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan Surat Telegram No. Pol.: STR/112/III/2009 tanggal 16 Pebruari. Surat Telegram tersebut berisi tentang perintah untuk penan-datanganan kontrak kinerja tentang reformasi birokrasi Polri yaitu program *Quick Wins* dari para pejabat utama Polda, Kapolwil, Kapoltabes, Kapolres, dan Kapolsek, serta perintah untuk melakukan aksi nyata dalam me-

nindaklanjuti program *Quick Wins*.

Dalam hal ini seluruh pimpinan satuan kewilayahan berupaya merealisasikan dalam berbagai bentuk model penerapan, misalnya dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi informasi merupakan alat bantu yang sangat efektif bagi seseorang, sebuah institusi atau sebuah negara dalam penyampaian pesan maupun informasi. Bentuk dari teknologi informasi pun beragam, ada berbagai macam aplikasi teknologi informasi antara lain Internet, telepon, handphone, fax, televisi, radio, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer dan elektronika yang berkembang sangat pesat memudahkan masyarakat untuk dapat menerimanya secara cepat dan mudah, generasi muda pada umumnya telah familiar dengan dunia komputer, internet, dan elektronika. Melihat hal tersebut, salah satu bentuk model penerapan program *Quick Wins* yang diselenggarakan oleh Polres Kendal Polda Jawa Tengah adalah dengan memberdayakan teknologi informasi berupa internet, yaitu dengan memberikan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) secara *online* melalui website *polreskendal.com*.

Tujuan pimpinan Kepolisian Resort Kendal dengan pemberian SP2HP secara online melalui website *polreskendal.com* tersebut adalah menindaklanjuti program *Quick Wins* yang berkenaan dengan transparansi penyidikan dengan memanfaatkan

internet berupa website untuk memberikan informasi atau pesan yang berkaitan dengan kepolisian khususnya tentang perkembangan dalam tahap penyidikan kepada masyarakat atau pihak – pihak yang berkepentingan terhadap proses penyidikan secara mudah dan cepat, dengan harapan penyampaian SP2HP secara *online* tersebut dapat mengatasi keluhan-keluhan masyarakat terhadap penyampaian perkembangan penyidikan yang dinilai lambat dan tidak transparan menjadi cepat dan transparan.

Oleh karena itu untuk mengetahui penerapan program Kapolres Kendal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Penerapan Website *polreskendal.com* Dalam Transparansi Penyidikan Sat Reskrim Melalui SP2HP Online di Polres Kendal”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online?
- b. Bagaimana kendala penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online.
- b. Mendeskripsikan kendala penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online.

B. LANDASAN TEORETIS

1. Website *polreskendal.com*

Salah satu alat penunjang teknologi informasi yang sangat populer adalah internet. internet (*Inter-Net-work*) merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (e-mail, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login, dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya (Kadir & Wahyuni 2003:-444).

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi,

suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dan lain-lain. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Fungsi dari website adalah:

- a. Memperluas ruang produksi dan memperkenalkan profil suatu perusahaan atau instansi pemerintahan.

Sebagai media komunikasi dan wadah penyedia berbagai informasi maka website dapat digunakan sebagai sarana pendukung promosi dari suatu perusahaan dan memperkenalkan profil suatu perusahaan atau instansi pemerintahan. Keuntungan dari fungsi website ini antara lain tampilan yang baik dari suatu perusahaan atau instansi pemerintahan akan memberi image

- yang baik pada masyarakat, alamat website kini menjadi salah satu identitas dari pemiliknya, dapat memberikan informasi yang *up to date* pada masyarakat.
- b. Mempermudah komunikasi

Agar dapat saling berkomunikasi dengan para klien atau customer, perusahaan dapat menjalin komunikasi melalui email ataupun informasi kontak yang berada dalam website. Komunikasi akan lebih mudah walaupun perbedaan lokasi sangat jauh dan sudah tentu lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.
 - c. Berinteraksi

Website dapat dijadikan ajang interaksi dengan para pengunjung website antara lain dapat dijadikan ajang jual-beli, forum diskusi, *upload* atau *download file* dan lain sebagainya. Jadi di sini fungsi website bukan hanya sebagai wadah penyedia informasi saja.

Dari artikel mengenai Arti penting dan fungsi sebuah website dapat diambil alasan mengapa saat ini website perlu dimiliki, antara lain kemudahan dalam penyampaian pesan, menghemat dalam komunikasi, mempunyai imej lebih profesional, dan menghemat waktu.

Polres Kendal telah menerapkan suatu situs atau website yang bernama website *polreskendal.com*. Website ini merupakan website statis yang berisi tentang profil Polres Kendal, satuan fungsi – fungsi Polres Kendal beserta

visi dan misinya, selain menggambarkan tentang profil dari Polres Kendal, website *polreskendal.com* juga memberikan informasi – informasi seputar kamtibmas dan berita – berita umum lainnya. Website ini disebut statis karena dalam pengendalian dan pengembangannya dilakukan oleh pemilik website itu sendiri atau biasa dikenal dengan administrator atau operator.

Perusahaan atau instansi pemerintahan dalam pembuatan suatu kebijakan maupun dalam menerapkan suatu sistem tidak terlepas dari namanya manajemen dan komunikasi. Maka di sini akan dibahas pula mengenai manajemen dan komunikasi.

2. Teori Komunikasi

Dalam setiap penyampaian pesan dan informasi pasti tidak akan terlepas dari namanya komunikasi. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator (*communicator*) sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama komunikan (*communi- catee*). Komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam bukunya Effendy (2003) Komunikasi akan terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Sebaliknya, jika tidak terjadi kesamaan makna antara kedua aktor komunikasi yakni komunikator dan komunikan dengan lain perkataan komunikan tidak mengerti pesan yang diterimanya, maka komunikasi tidak

akan terjadi. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan pemberian pesan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka atau tanda-tanda lainnya. Komunikasi bersifat transaksional komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau porsonal (www.gozidni.multiply.com Definisi Dan Tingkatan Proses Komunikasi).

Tingkatan Proses Komunikasi Hingga sekarang tercatat tidak kurang dari seratus teori dan model komunikasi yang diketengahkan para pakar komunikasi, terutama pakar Amerika. Dari sekian banyak teori dan model komunikasi, yang berkaitan dengan rumusan masalah proses penerapan website adalah model komunikasi dari Harrold Lasswel (1948). Model Lasswel merupakan teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi. Lasswel menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who* (siapa), *Says What* (berkata apa), *In Which Channel* (melalui saluran apa), *To Whom* (kepada siapa), *With What Effect* (dengan efek apa). Model Lasswel sering diterapkan dalam komunikasi massa, unsur-unsur model tersebut dalam proses komunikasi (Diktat Komunikasi Sosial 2008:49), yaitu:

- a. *Who* (siapa): Komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi maupun instansi.
 - b. *Says What* (apa yang dikatakan): Apa isi penyampaian dari komunikator dapat berupa suatu ide, informasi, opini, pesan dan sikap.
 - c. *In Which Channel* (melalui saluran apa): Dengan saluran komunikasi atau dengan media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi.
- (4) *To Whom* (kepada siapa): komunikan yang menjadi sasaran komunikasi. Kepada siapa pernyataan, pesan dan informasi itu ditujukan.
 - (5) *With What Effect* (dengan efek apa): akibat yang ditimbulkan dari penyampaian pesan dan informasi tersebut.

3. Transparansi Penyidikan Sat Reskrim melalui SP2HP

Pengertian Transparansi menurut sumber yang didapat dari Wikipedia Ensiklopedi bebas berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting. Ditinjau dari Keputusan Menteri-Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/26/M.PAN/2/-2004 tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyeleng-

garaan Pelayanan Publik, yang dimaksud transparansi dalam pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Penyidikan didalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 tahun 1981 diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian – pengertian di atas maka yang dimaksud dengan Transparansi penyidikan merupakan keterbukaan dalam penyampaian informasi tentang perkembangan penanganan sehubungan dengan proses penyidikan dalam suatu tindak pidana.

Transparansi Penyidikan Melalui Pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang termasuk dalam program Quick Wins ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak melalui pemberian SP2HP sejak tahap penerimaan, penilaian laporan, tahap penyelidikan dan penyerahan berkas perkara dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dilaksanakan secara manual

maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membuka website di tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri.

Bentuk-bentuk pelaksanaan *quick wins* dalam transparansi penyidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan kewilayahan Polri sesuai dengan Surat Perintah NO.POL.: SPRIN/390.A/RA/III/2009/BARESK RIM tanggal 31 Maret 2009 tentang pelaksanaan uji coba program quick wins bidang transparansi penyidikan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Penerimaan laporan atau pengaduan diberikan pada saat mengeluarkan Surat Perintah penyelidikan atau penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari. Tahap penyelidikan, dengan waktu penyampaian SP2HP untuk kasus ringan dan sedang paling lambat hari ke 14 (empat belas). Sedangkan untuk kasus sulit dan sangat sulit maka pelapor menerima SP2HP pada hari ke 15 (lima belas) dan hari ke 30 (tiga puluh). Tahap penindakan dan pemeriksaan dengan waktu penyampaian SP2HP untuk kasus ringan pada hari ke 15 dan hari ke 30, selanjutnya untuk sedang SP2HP dikirim pada hari ke 15, 30, 45, dan hari ke 60, selanjutnya untuk kasus sulit diberikan pada hari ke 20, 40, 80, 100 dan hari ke 120. Tahap penyelesaian dan

penyerahan berkas perkara, dengan waktu penyampaian SP2HP pada saat penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara tahap pertama, selanjutnya apabila berkas perkara P.19 maka SP2HP diberikan setelah dilakukan pelimpahan kembali, demikian juga pada saat penyerahan berkas perkara pada tahap kedua maka SP2HP pun harus disampaikan kepada pelapor. Tata cara dalam pelaksanaannya penyidik menginformasikan penanganan perkara yang ditanganinya kepada pelapor dengan langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan, identitas penyidik yang menanganinya, nomor telepon penyidik, dan kendala dalam penyidikan. Penyampaian SP2HP dilakukan melalui surat atau email.

- b. Desk Telepon
Sarana penerima pengaduan dan pelaporan dari masyarakat melalui telepon. Setiap saat pada jam kerja, masyarakat pengadu atau pelapor dapat mengetahui perkembangan penyelidikan atau penyidikan melalui nomor telepon yang ada di satuan kewilayahan. Petugas operator telepon disiapkan khusus setiap hari kerja sebanyak 2 orang.
- c. Website
Merupakan aplikasi berbasis website yang disediakan oleh Bareskrim Polri dalam rangka mempermudah masyarakat yang berkepentingan dalam proses penyidikan untuk mengetahui per-

kembangan laporan yang dibuat dengan cara mengakses lewat website secara online. Prosedur dalam mengakses website meliputi mengisi nomor laporan polisi, mengisi nama pelapor, memasukkan password (password diberikan pada saat menerima laporan), dan mengambil Password dari bagian nomor laporan polisi.

- d. SMS Gateway (*Short Message Service*)

Merupakan aplikasi yang memberikan informasi melalui sms untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan laporan yang ditangani penyidik.

- e. Gelar perkara

Gelar dilakukan secara rutin dilaksanakan oleh fungsi yang menangani perkara untuk memberikan keterbukaan terhadap proses penyidikan suatu tindak pidana.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara penelitian dokumen, wawancara, pengamatan (*observasi*) untuk memperoleh data dan informasi. Data dan informasi tersebut diolah atau dianalisis untuk dapat mendeskripsikan penerapan website polreskendal.com dalam transparansi penyidikan melalui penyampaian SP2HP secara online di Polres Kendal serta mengetahui kendala-kendala dalam penerapannya sehingga diharapkan dapat bermanfaat

bagi Polri untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat.

Penelitian ini difokuskan untuk mencari data dan informasi terhadap permasalahan yang telah dijabarkan dalam persoalan-persoalan sebagai variabel penelitian yaitu: bagaimana proses penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online dan kendala – kendala dalam penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online di Polres Kendal.

Lokasi penelitian dilaksanakan sebagai berikut. Di Akpol untuk menyusun rencana penelitian, penelitian dokumen, analisa hasil penelitian dan lain- lain; untuk pemeriksaan dokumen, wawancara dengan responden, pengamatan lapangan (observasi) dilakukan di wilayah Polres Kendal yang memiliki gambaran umum seperti di bawah ini.

Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah 1.002,235 KM² dengan pebagian wilayah terdiri dari 19 Kecamatan dan 285 desa, Polres Kendal sebagai penanggung jawab pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai mana diatur dalam UU No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 16 Polsek dan 1 Pospol sebagaimana hal tersebut masih adanya kecamatan yang masih di bawah pembinaan 1 (satu) polsek dikarenakan adanya pemekaran wilayah di pemerintah kabupaten Kendal sehingga perlunya penyesuaian di jajaran Polres Kendal

untuk memback up terhadap keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Ada tiga teknik yang digunakan, yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan hadir, melihat dan mengamati sendiri bagaimana operator memasukan data SP2HP secara online melalui website kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Merupakan teknik yang digunakan penulis untuk melengkapi data dengan cara tatap muka langsung dengan sumber data baik penyidik Kasat reskrim, operator website, Kapolres dan masyarakat Kendal untuk kemudian mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Kapolres Kendal, Kasat Reskrim, Operator website *polreskendal.com*, dan masyarakat.

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan pada dokumen seperti tulisan (*paper*), kertas dan catatan. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian untuk mengambil data adalah Laporan bulanan sat Reskrim Polres Kendal, Intel Dasar Polres Kendal.

Agar dapat diperoleh gambaran tentang data atau fakta- fakta terhadap objek penelitian secara optimal, maka

diperlukan alat-alat pengambil data sebagai berikut; peralatan untuk pemeriksaan dokumen, pencatat dokumen, perekam dokumen; alat untuk wawancara dengan responden yaitu daftar pertanyaan atau pedoman wawancara; alat untuk pengamatan atau observasi antara lain camera digital dan Laptop untuk mengakses website *polres-kendal.com*.

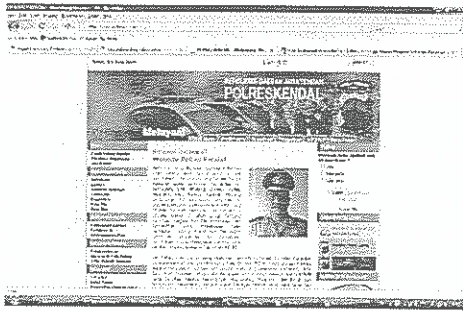
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu jenis analisa data kualitatif untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan tentang penyampaian SP2HP secara online melalui penerapan website *polreskendal.com*. Langkah- langkah yang dilakukan meliputi; pengumpulan data, reduksi dan penyederhanaan data, penyajian data, analisis data dan interpretasi, serta simpulan. Pertama kali yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara dapat beragam sehingga perlu diadakan reduksi data, data baru dapat disajikan setelah direduksi. Reduksi itu sendiri berarti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah melalui tiga tahap tersebut yakni wawancara, reduksi dan penyajian maka dapat diambil verifikasi atau keputusan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Website Online

Dari hasil wawancara dengan Kapolres Kendal AKBP Sugihardi, SH mengenai penerapan website *polres-kendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online maka diperoleh keterangan bahwa pembuatan website *polreskendal.com* yang diluncurkan pada 1 maret 2009 ini dilatar belakangi karena melihat dari perkembangan kemajuan teknologi dimana masyarakat sudah tidak asing lagi dengan namanya internet yang sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk mencari informasi- informasi dan pengetahuan tentang situasi yang sedang terjadi. Tujuan pembuatan website *polreskendal.com* merupakan upaya tindak lanjut dari Kapolres Kendal berkaitan dengan program *quick wins* Polri untuk menunjukkan bahwa Polri lebih transparan kepada masyarakat dalam kebirokrasiannya sehingga dapat membuka wawasan dan menambah informasi- informasi tentang kepolisian kepada masyarakat. Selain itu, website *polres-kendal.com* juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan kepada masyarakat dalam hal penerbitan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) agar penyampaian informasi tentang perkembangan penyidikan lebih mudah diakses, mengurangi biaya penyampaian informasi, menghemat waktu dan menunjukkan tingkat pro-

fesionalisme Polri.



Gambar 1. Halaman utama website *polreskendal.com*

Pembuatan website *polreskendal.com* ini dirancang dengan menggunakan anggaran swadaya dari Polres Kendal sendiri dan mendapatkan bantuan dari para stakeholder yang bersimpati terhadap kemajuan Polri. Website *polreskendal.com* merupakan website statis yang sistem pengendaliannya dan pengaturannya dilakukan oleh operator website itu tersendiri yang disebut admin. Operator website *polreskendal.com* ditunjuk dari anggota bintara Polres Kendal yang diberi Sprint (surat perintah) Kapolres untuk menjadi operator, menurut keterangan yang diberikan oleh Kapolres Kendal disampaikan bahwa terdapat tiga orang operator yang mengendalikan website *polreskendal.com*. Tiga orang yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kapolres Kendal tersebut sebelumnya telah mempunyai tugas dan jabatan di setiap satuan fungsinya masing-masing.

Operator yang bertugas mengoperasikan dan mengendalikan website

di Polres Kendal diberi pelatihan khusus mengenai teknologi informasi, sistem informasi, dan prosedur dalam pengoperasian website oleh team IT Polda Jateng untuk bekal dalam pelaksanaan tugasnya sebagai operator. Pelatihan dilakukan selama satu minggu di Polda Jateng. Untuk mendukung penerapan website *polreskendal.com*, Polres Kendal telah mempunyai sistem jaringan internet *Speedy* yang bisa diakses di setiap komputer dan saling terhubung antara yang satu dengan yang lain sehingga pengiriman informasi dan laporan-laporan dapat disampaikan dengan cepat.

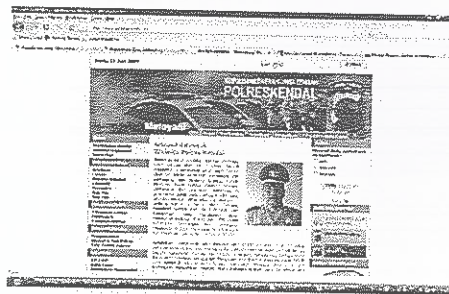
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Dodo Marsodo,SH menerangkan bahwa SP2HP adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan diinformasikan kepada pihak korban atau pelapor. Menurut keterangan yang didapat dari Kasat Reskrim, secara singkat prosedur pembuatan SP2HP di Polres Kendal dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pelapor atau korban datang melaporkan tentang kasus atau perkara yang terjadi kepada penyidik.
- b. Penyidik atau penyidik pembantu melakukan penilaian laporan dari pemeriksaan pelapor atau korban yang dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan.

- c. Diberitahukan kepada pelapor atau korban tentang jangka waktu proses penyidikan.
- d. Pemberian SP2HP dilakukan secara berkala dan rutin melalui surat atau website.
- e. Kasat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyidik yang membuat SP2HP.
- f. Pelapor atau korban dapat menyampaikan komplain atau keluhan.

Penyampaian SP2HP sateskrim Polres Kendal kepada pelapor atau korban telah dilakukan sebelumnya secara manual melalui surat yang dikirim ke rumah korban atau pelapor. Setelah peluncuran website *polreskendal.com* pada tanggal 1 Maret 2009 pembuatan SP2HP dilakukan dengan dua cara yaitu melalui surat yang dikirim ke rumah korban atau pelapor dan penyampaian SP2HP melalui website sateskrim yang berinduk pada website Polres Kendal. Dari hasil observasi penulis, didapat data mengenai pemberian info perkembangan penyidikan melalui website yang bisa dilihat oleh korban atau pelapor secara online dengan mengakses website *polreskendal.com* dan mengikuti panduan mengakses SP2HP sebagai berikut.

- a. Korban atau pelapor bisa mengakses website *www.polreskendal.com*
- b. Masuk atau pilih ke menu SP2HP.

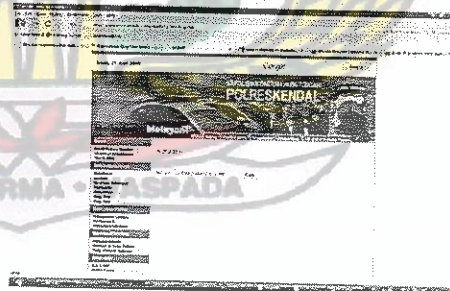


Gambar 2. Pemilihan menu SP2HP pada halaman website *polreskendal.com*

- c. Setelah masuk ke menu SP2HP, korban atau pelapor dapat mengetikkan nomor LP (laporan Polisi) yang diberikan penyidik berdasarkan perkara yang dilaporkan kemudian tekan tombol **CARI**

Contoh:

NO.LP : LP/02/I/2009/SEK
GEMUH

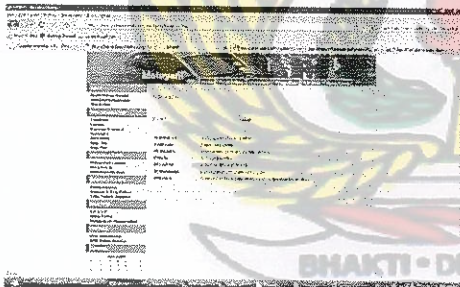


Gambar 3. Pengisian NO LP pada menu SP2HP

- (4) Dari hasil pencarian SP2HP melalui website apabila nomor LP yang dimasukkan benar maka perkara yang telah ditangani oleh penyidik sateskrim Polres Kendal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

akan ditampilkan informasi perkembangannya sebagai berikut:

NOMOR LP : LP/02/I/2009/SEK
GEMUH
TANGGAL : 7 JANUARI 2009
PERKARA : PENCURIAN
DENGAN
PEMBERATAN
PASAL : 363 KUHPIDANA
PELAPOR : H.JA'FAR BIN
H.KUMAZI
TERSANGKA : SUPARJONO
BIN SUPRAPTO,
DKK
PROSES : PERKARA
SUDAH
DIBERKAS DAN
DISERAHKAN
KE JPU



Gambar 4. Bentuk SP2HP melalui website polreskendal.com

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator penginput data SP2HP Sat Reskrim Polres kendal Bripda May Fitri Yanti didapat keterangan bahwa saat ini Penginput data SP2HP Sat Reskrim pada website hanya dikerjakan oleh satu orang yang merangkap juga sebagai Banit lidik

Unit PPA Sat Reskrim Polres Kendal. Petugas penginput data memasukkan data SP2HP pada website berdasarkan SP2HP yang dibuat dalam bentuk surat oleh penyidik. Setiap SP2HP yang dimuat di website operator penginput data membuat laporan bulanan jumlah SP2HP yang telah diterbitkan di website melalui Ur Telematika kemudian dilanjutkan kepada Kapolres sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan serta wujud pengawasan dan pengendalian pimpinan terhadap bawahan.

2. Kendala Penerapannya

Penerapan website dalam penyampaian SP2HP secara online di Sat Reskrim Polres Kendal merupakan pelaksanaan dari penjabaran program *Quick Wins* yang dicanangkan oleh Kapolri sebagai bagian dari *Grand Strategy Polri* guna meningkatkan pelayanan Polri khususnya di bidang transparansi penyidikan. Secara teknis sosialisasi mengenai SP2HP dari Bareskrim Polri telah dilakukan di seluruh jajaran kewilayahan, namun mengingat program tersebut baru diluncurkan pada bulan Januari 2009, tentu saja dibutuhkan banyak persiapan khususnya ditinjau dari segi internal dan eksternal Polri yang berakibat munculnya beberapa kendala yang dapat menghambat penyampaian SP2HP secara online melalui website kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Hal tersebut juga dialami oleh

Sat Reskrim Polres Kendal, ada beberapa kendala yang penulis temukan dalam penerapan SP2HP secara online melalui website ini. Kendala yang paling utama berasal dari ekstern Polres Kendal sendiri yaitu dari masyarakat. Berdasarkan teori diterangkan bahwa setiap penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan tidak akan terlepas dari namanya proses komunikasi. Effendy (2003) komunikasi akan terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan dalam arti masyarakat mengetahui dan mengerti terhadap pesan dan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Fakta yang ditemukan penulis di wilayah Polres Kendal memastikan bahwa masyarakat Kendal sebagai komunikan masih belum mengetahui dan mengerti tentang adanya website *polreskendal.com* sebagai sarana untuk penyampaian SP2HP secara online kepada korban. Kendala ekstern dari masyarakat tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Dodo Marsodo,SH mengungkapkan juga bahwa penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online kepada korban atau pelapor tindak pidana masih ada beberapa kendala baik dari dalam (intern) Polri sendiri maupun dari luar (ekstern). Berikut kendala-kendala yang muncul baik dari dalam Polres

Kendal maupun dari luar yaitu situasi dan kondisi masyarakat Kendal sendiri antara lain:

a. Kendala-kendala yang muncul dari dalam (intern) Polres Kendal

- (1) Kurangnya personil dari Sat Reskrim Polres Kendal yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara tugas operator website dalam menginput data SP2HP dengan jabatan yang diembannya sebagai anggota unit PPA.
- (2) Tingkat SDM Polri yang masih rendah
- (3) Anggaran yang kurang memadai.
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pembuatan dan pemberian SP2HP.
- (5) Keinginan dan motivasi yang lemah dari penyidik dalam menangani suatu kasus sehingga terkesan memperlambat penyelesaian suatu kasus.
- (6) Kurangnya konsistensi dari operator penginput data dalam membuat SP2HP mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian SP2HP.

b. Kendala-kendala yang muncul dari luar (ekstern)

- (1) Mayoritas penduduk wilayah hukum Polres Kendal adalah agraris yang tingkat pendidikannya rendah dan kondisi wilayah pada umumnya berupa pedesaan sehingga perkembangan teknologi informasi

masih kurang maju.

- (2) Karakteristik masyarakat Kendal yang secara umum tidak mengetahui adanya website *polreskendal.com* sehingga tidak mengetahui tentang informasi pembuatan SP2HP melalui internet.

Dari hasil wawancara dengan korban tindak pidana dalam kasus pencurian uang di wilayah hukum Polres Kendal yaitu H. Toni Ja'far pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir sekolah menengah atas didapat keterangan bahwa korban tidak mengetahui tentang adanya penyampaian SP2HP melalui Internet karena belum pernah diberitahu dari pihak Polres Kendal sendiri kalau perkembangan hasil penyidikan bisa dilihat di website *polreskendal.com*. Selama ini korban hanya memperoleh informasi perkembangan penyidikan dari SP2HP dalam bentuk surat yang dikirim ke rumahnya. Hasil wawancara dengan Zainal Alimin pekerjaan Wartawan yang merupakan korban tindak pidana pencurian didapat keterangan juga bahwa korban tidak mengetahui tentang adanya penyampaian SP2HP melalui website karena belum pernah mendapatkan pemberitahuan dari Polres Kendal ataupun sosialisasi mengenai website dan penyampaian SP2HP melalui website.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka sim-

pulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya penerapan website *polreskendal.com* dalam menyelenggarakan transparansi penyidikan melalui penyampaian SP2HP secara online di Polres Kendal masih kurang maksimal, proses manajemen yang kurang matang berdampak pada hasil yang menjadi tujuan utama dari penerapan sistem tersebut menjadi tidak efektif dan kurang dirasa manfaatnya oleh masyarakat setempat. Kemudian penyampaian SP2HP secara online di Polres Kendal belum memenuhi standar dalam mengakses SP2HP melalui website yang telah disosialisasikan oleh Bareskrim Polri, sehingga keamanan dari informasi yang di-sampaikan kurang terjaga. Kegiatan sosialisasi atau pemasangan poster, spanduk, banner dalam rangka pemberitahuan tentang sistem penyampaian SP2HP secara online melalui website yang diadakan Polres Kendal masih sedikit sekali, akibatnya masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang keberadaan sistem tersebut.
- b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reskrim Polres Kendal dalam penerapan website *polreskendal.com* dalam penyampaian SP2HP secara online kepada pelapor atau korban tindak pidana adalah kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern antara lain

berupa belum dibentuknya bagian khusus pada Sat Reskrim Polres Kendal untuk menangani masalah Penyampaian SP2HP secara online melalui website polreskendal.com. Kendala ekstern antara lain kondisi masyarakat Kendal yang kurang maju karena sebagian besar penduduknya agraris sehingga belum siap dalam penggunaan internet sebagai media penyampaian SP2HP.

2. Saran

Penerapan website polreskendal.com dalam penyampaian SP2HP oleh Sat Reskrim Polres Kendal dapat diperbaiki dan lebih diefektifkan lagi dengan cara:

- a. Membentuk suatu bagian khusus pada Sat Reskrim Polres Kendal untuk menangani masalah website dan penyampaian SP2HP secara online.
- b. Memperbaharui kembali format pengaksesan SP2HP melalui website disesuaikan dengan standar yang diberikan oleh Bareskrim Polri.
- c. Merencanakan anggaran yang tetap dan berkelanjutan untuk membiayai jaringan internet dan website polreskendal.com sehingga program tersebut dapat terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akpol. 2007. *Diktat Dasar-dasar Manajemen*. Semarang : Akademi Kepolisian.
- 2007. *Diktat Komunikasi Sosial*. Semarang : Akademi Kepolisian.
- 2009. *Pedoman Penelitian, Penulisan dan Tata Tulis Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Akademi Kepolisian.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kadir, Abdul dan Triwahyuni, Terra Ch. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Mabes Polri, *Laporan Kemajuan Awal Program Reformasi Birokrasi Polri*, Jakarta, Maret 2009.
- Majalah Bulanan Polda Metropolitan Jakarta Raya, *Polisi Metropolitan Jakarta Raya*, edisi 31 – Mei 2009.
- Moeleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- UU No. 8 Thn 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Pedoman Pelaksanaan Quick Wins Bidang Transparansi Penyidikan, Mei 2009.

